

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari instansi atau dinas terkait.

Pendekatan kuantitatif adalah suatu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data angka yang diolah dengan metode statistika tertentu (Azwar, 1998).

Dengan kata lain, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif jika data yang digunakan bersifat angka. Selanjutnya, Menurut Azwar penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau pun mencari implikasi. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Hal ini disebabkan penelitian ini ingin memberikan gambaran suatu data yang dianalisis secara statistik secara sistematis, akurat, dan jelas.

## 2. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta buku dan literatur lain sebagai referensi untuk menunjang penelitian ini.

### B. Batasan Variabel, Teknik, dan Sampel Penelitian

#### 1. Batasan Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Peran (*Share*) PAD: merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah (Deddy K).
- b. Pertumbuhan (*Growth*) PAD: merupakan angka pertumbuhan PAD tahun  $i$  dari tahun  $i-1$  (Deddy K).
- c. Elastisitas PAD terhadap PDRB: merupakan rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Daerah yang mempunyai nilai elastisitas  $\geq 1$ , maka setiap perubahan PDRB di daerah tersebut sensitif terhadap perubahan/peningkatan PAD. Bagi daerah dengan elastisitas  $< 1$  patut diduga nilai tambah PDRB-nya lebih banyak keluar dari daerah tempat kegiatan perekonomian tersebut diselenggarakan (Deddy K).

## 2. Teknik Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2008). Peneliti menggunakan salah satu teknik *Non Probability Sampling* yakni teknik *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel penelitian dengan sengaja (tidak acak) menggunakan kriteria atau pertimbangan tertentu. Menurut Sugiyono pengertian *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya. Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sampel adalah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

**Tabel 4. Kriteria Pemilihan Sampel.**

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Sampel
1.	Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sampai tahun 2013	15
2.	Kabupaten/Kota yang berdiri sejak tahun 2001-2013 dikeluarkan dari sampel, karena berdiri setelah implementasi otonomi (2001).	(5)
3.	Kabupaten/Kota yang berdiri setelah Tahun 1996 dikeluarkan dari sampel karena tidak memenuhi data.	(5)
	<i>Sehingga Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang berdiri sebelum implementasi otonomi daerah dan memenuhi data.</i>	5

*Sumber : BPS Lampung (data diolah).*

Pada Tabel 4 di atas, diketahui bahwa jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013 berjumlah 15 Kabupaten/Kota, dan Kabupaten/Kota Provinsi

Lampung yang sudah berdiri sejak tahun 2001-2013 berjumlah lima Kabupaten/Kota. Namun terdapat tiga Kabupaten/Kota yang berdiri setelah tahun penelitian (tahun 1996) sehingga tidak memenuhi data. Penelitian ini menganalisis Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang sudah berdiri sebelum implementasi otonomi daerah (tahun 2001), sehingga diketahui jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang sudah berdiri sebelum tahun 2001 dan memenuhi data berjumlah 5 (lima) Kabupaten/Kota.

### 3. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Sampai tahun 2013, Provinsi Lampung memiliki 15 Kabupaten/Kota dan sampel yang diambil untuk memperoleh data dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) sampel yang termasuk dalam kriteria berdiri sebelum implementasi otonomi daerah (sebelum tahun 2001) dan memenuhi data. Lima Kabupaten/Kota ini mengalami transisi sebelum disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah pada tahun 1999 dan implementasi otonomi daerah tahun 2001.

**Tabel 5. Sampel Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Ibukota
1.	Kabupaten Lampung Barat	Liwa
2.	Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda
3.	Kabupaten Lampung Tengah	Gunung Sugih
4.	Kabupaten Lampung Utara	Kota Bumi
5.	Kota Bandarlampung	Bandarlampung

Sumber : BPS Lampung.

Tabel 5 di atas diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 5 (lima) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yakni Kota Bandarlampung, Kabupaten

Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Lampung Barat.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan data dari literatur-literatur dan buku-buku yang mendukung (Sholikhah, 2011). Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku, serta dokumen perusahaan (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari :

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Data atau informasi yang diperoleh dari buku referensi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **D. Tahapan dan Alat Analisis**

Dalam penelitian ini alat *software* yang digunakan adalah *Microsoft Office Excel*.

Tahapan-tahapan serta alat analisis yang digunakan adalah :

#### **1. Menghitung Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan daerah adalah seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus

selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah ditampilkan dengan menggunakan peta kemampuan daerah. Untuk menentukan Kemampuan Keuangan Daerah, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui Ukuran Peran (*Share*) PAD, Pertumbuhan (*Growth*) PAD, dan Elastisitas.

- *Share* PAD

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (5.1)$$

(Sumber: Deddy K.)

- *Growth* PAD

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\% \quad (5.2)$$

(Sumber: Deddy K.)

- Elastisitas PAD

$$\text{Elastisitas} = \frac{\text{Growth PAD}}{\text{Pertumbuhan Ekonomi}} \quad (5.3)$$

(Sumber: Deddy K.)

- b. Pemetaan dan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dengan Metode Kuadran dan Metode Indeks.

Metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai pertumbuhan (*growth*) PAD dan peran (*share*) PAD. Dengan nilai *growth* dan

*share* maka masing-masing kabupaten/kota dapat diketahui posisinya pada kuadran berapa.

**Tabel 6. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran.**

<b>Kuadran</b>	<b>Kondisi</b>
<b>I</b>	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> disertai nilai <i>growth</i> yang tinggi.
<b>II</b>	Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan PAD tinggi.
<b>III</b>	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Di sini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
<b>IV</b>	Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

*Sumber : Deddy K.*

Berdasarkan Tabel 6 di atas, diketahui bahwa klasifikasi kemampuan keuangan daerah terbagi menjadi empat kuadran yakni paling ideal (Kuadran I), belum ideal (Kuadran II), belum ideal (Kuadran III), dan paling buruk (Kuadran IV). Klasifikasi Kemampuan Keuangan daerah berdasarkan metode kuadran dapat ditentukan dengan Gambar 4 berikut.

#### Rata-rata GROWTH (%)

	<b>KUADRAN II</b>	<b>KUADRAN I</b>
	<i>Share</i> : Rendah	<i>Share</i> : Tinggi
<b>Rata-rata</b>	<i>Growth</i> :Tinggi	<i>Growth</i> :Tinggi
<b>SHARE (%)</b>	<b>KUADRAN IV</b>	<b>KUADRAN III</b>
	<i>Share</i> : Rendah	<i>Share</i> : Tinggi
	<i>Growth</i> :Rendah	<i>Growth</i> :Rendah

*Sumber : Deddy K.*

**Gambar 4. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran.**

Rata-rata *share* diperoleh dari persamaan (5.1) yang dibagi dengan jumlah *share* PAD selama kurun waktu penelitian, rata-rata *growth* PAD diperoleh dari persamaan (5.2) yang dibagi dengan jumlah *growth* PAD keseluruhan. Pengukuran tinggi atau rendahnya *share* PAD dan *growth* PAD ditentukan dengan membandingkan rata-rata *share* PAD dan rata-rata *growth* PAD dengan total rata-rata *share* PAD dan rata-rata *growth* PAD secara keseluruhan.

Daerah yang berada pada kuadran I adalah daerah yang mempunyai nilai *share* PAD dan *growth* PAD di atas nilai rata-rata. Pada Kuadran II adalah daerah yang mempunyai *growth* PAD lebih besar dari rata-rata tetapi nilai *share*-nya berada di bawah nilai rata-rata. Pada kuadran III adalah daerah yang memiliki nilai *share* PAD yang lebih tinggi dari nilai rata-rata *share* PAD seluruh kabupaten/kota namun nilai *growth*-nya lebih rendah dari rata-rata *growth* seluruh kabupaten/kota. Pada kuadran IV, baik nilai *growth* PAD maupun nilai *share* PAD keduanya lebih rendah dari nilai rata-rata *growth* PAD dan *share* PAD seluruh kabupaten dan kota.

Adapun metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan rata-rata hitung dari Indeks *Growth*, Indeks Elastisitas, dan Indeks *Share*. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Menyusun indeks untuk setiap komponen IKK dilakukan dengan menggunakan persamaan umum:

$$\text{Indeks X} = \frac{\text{Nilai X hasil pengukuran} - \text{Nilai X kondisi minimum}}{\text{Nilai X kondisi maksimum} - \text{Nilai X kondisi minimum}} \quad (5.4)$$

(Sumber: Deddy K.)



X merupakan hasil nilai Indeks *Share/Growth/Elastisitas* per Kabupaten/Kota dan per tahun. Nilai X hasil pengukuran merupakan nilai *Share/Growth/Elastisitas* per Kabupaten/Kota pada persamaan (5.1)/(5.2)/(5.3) per tahun. Nilai X minimum merupakan nilai hasil perhitungan X yang terkecil dan nilai X maksimum merupakan nilai hasil perhitungan X yang terbesar. Hasil indeks per Kabupaten/Kota dan per tahun tersebut dirata-rata sehingga menjadi hasil Indeks X sebelum otonomi atau sesudah otonomi.

Berdasarkan persamaan diatas maka persamaan IKK dapat ditulis sebagai berikut :

$$IKK = \frac{XS + XG + XE}{3} \quad (5.5)$$

(Sumber: Deddy K.)

Keterangan :

XS : Indeks *Share* (Peran PAD) terhadap Belanja

XG : Indeks *Growth* (Pertumbuhan PAD)

XE : Indeks Elastisitas pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

- c. Menyusun Peta Kemampuan berdasarkan IKK yang diperoleh dari persamaan (5.5). Berdasarkan *range* IKK tertinggi dan IKK terendah, kemudian disusun peta kemampuan keuangan yang dibagi dalam tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

**Tabel 7. Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah.**

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00 – 0,33	Rendah
0,34 – 0,63	Sedang
0,64 – 1,00	Tinggi

Sumber : Deddy K.

Dari Tabel 7 diketahui sepertiga besar pertama dikelompokkan dan dikategorikan sebagai kabupaten-kabupaten yang mempunyai kemampuan keuangan tinggi. Sepertiga besar kedua dikelompokkan dan dikategorikan sebagai kabupaten-kabupaten yang mempunyai kemampuan keuangan sedang. Dan sepertiga besar terakhir dikelompokkan dan dikategorikan sebagai kabupaten-kabupaten yang mempunyai kemampuan keuangan rendah.

## **2. Mengklasifikasikan tipe pertumbuhan ekonomi menggunakan Analisis Tipologi Klassen**

Alat analisis *Klassen Typology* (Tipologi Klassen) merupakan suatu teknik sederhana yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Sjafrizal (1997) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat analisis ini dapat diperoleh empat klasifikasi pertumbuhan masing-masing daerah yaitu: (1) daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, (2) daerah maju tetapi tertekan, (3) daerah berkembang cepat, dan (4) daerah relatif tertinggal. Maka penelitian ini membagi klasifikasi sebagai berikut :

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High growth and high income*) adalah laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita rata-rata nasional.
2. Daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah daerah yang relatif maju, tapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Daerah ini

merupakan daerah yang telah maju tapi dimasa mendatang pertumbuhannya tidak akan begitu cepat walaupun potensi pengembangan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar. Daerah ini mempunyai pendapatan perkapita lebih tinggi tapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

3. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang dapat berkembang cepat dengan potensi pengembangan yang dimiliki sangat besar tapi belum diolah sepenuhnya secara baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi, namun tingkat pendapatan perkapita yang mencerminkan dari tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah. Daerah ini memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.
4. Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah daerah yang masih mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita lebih rendah dari pada rata-rata nasional.

PDRB Perkapita (y)		
Laju Pertumbuhan PDRB (r)	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Daerah Maju dan Cepat	Daerah Berkembang Cepat
$r_i < r$	Daerah Maju tetapi Tertekan	Daerah Relatif tertinggal

**Gambar 5. Tipologi Klassen untuk Pengidentifikasian Daerah Tertinggal.**

Keterangan :

$r_i$  : Laju pertumbuhan ekonomi wilayah i

$y_i$  : PDRB perkapita wilayah i

$r$  : Laju pertumbuhan ekonomi wilayah referensi

$y$  : PDRB perkapita wilayah referensi

## E. Gambaran Umum Wilayah

### 1. Wilayah Administratif

Provinsi Lampung dengan Ibukota Bandarlampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km<sup>2</sup> termasuk 160 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada 1030 40' – 1050 50' Bujur Timur serta antara 60 45' – 30 45' Lintang Selatan. Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 833.847 Ha atau 25,26%. Selain itu merupakan 20,92% daerah perkebunan dan 20,50% tegalan/ladang, daerah pertanian, dan perumahan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

**Gambar 6. Peta Provinsi Lampung.**

Topografi Lampung dapat dibagi dalam lima unit topografi, yakni 1) daerah berbukit sampai bergunung dengan kemiringan berkisar 25%, dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut, 2) daerah berombak sampai bergelombang dengan kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan laut, 3) daerah dataran alluvial dengan kemiringan

0% sampai 3%, 4) daerah dataran rawa pasang surut dengan ketinggian  $\frac{1}{2}$  m sampai 1 m, serta 5) serta daerah *river* basin.

Secara administratif Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013.**

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Lampung Barat	Liwa	15	2.043,17
2.	Tanggamus	Kota Agung	20	2.731,16
3.	Lampung Selatan	Kalianda	17	2.007,01
4.	Lampung Tengah	Gunung Sugih	28	4.789,82
5.	Lampung Utara	Kotabumi	23	2.725,63
6.	Way Kanan	Blambangan Umpu	14	3.921,63
7.	Tulang Bawang	Menggala	15	4.385,84
8.	Lampung Timur	Sukadana	24	4.337,89
9.	Pesawaran	Geding Tataan	7	1.173,77
10.	Pringsewu	Pringsewu	8	625
11.	Mesuji	Mesuji	7	2.184
12.	Tulang Bawang Barat	Panaragan jaya	8	1.201
13.	Pesisir Barat	Krui	11	2.907,23
14.	Bandarlampung	Bandarlampung	13	192,96
15.	Metro	Metro	5	61,79
<b>Jumlah</b>			<b>215</b>	<b>35.288,09</b>

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2013.

Pada Tabel 8 di atas, diketahui jumlah kecamatan tersedikit dimiliki oleh Kota Metro yakni lima Kecamatan. Hal ini disebabkan luas wilayah Kota Metro merupakan yang tersempit di antara Kabupaten/Kota lainnya, hanya 61,79 Km<sup>2</sup>. Sedangkan Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah kecamatan terbanyak yakni 28 Kecamatan dan luas wilayahnya terluas dari Kabupaten/Kota lainnya yakni 4.789,82 Km<sup>2</sup>. Jumlah kecamatan Provinsi Lampung pada tahun 2013 sebanyak 215 Kecamatan dengan luas wilayah 35.288,09 Km<sup>2</sup>.

## 2. Gambaran Perekonomian

Gambaran perekonomian Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 di bawah berikut :

**Tabel 9. PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah).**

No.	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Lampung Barat	1.351.526	1.427.754	1.509.472	1.578.014	1.682.894
2.	Tanggamus	2.103.899	2.224.935	2.353.653	2.504.579	2.667.036
3.	Lampung Selatan	3.908.442	4.114.980	4.350.044	4.615.643	4.906.298
4.	Lampung Timur	3.947.097	4.119.786	4.328.221	4.569.353	4.811.393
5.	Lampung Tengah	5.553.010	5.883.047	6.228.793	6.587.165	7.006.637
6.	Lampung Utara	3.017.663	3.208.506	3.368.213	3.566.685	3.781.781
7.	Way Kanan	1.275.967	1.340.230	1.408.681	1.486.211	1.570.458
8.	Tulang Bawang	4.357.683	2.129.602	2.261.365	2.383.679	2.548.776
9.	Bandar Lampung	5.802.308	6.151.069	6.540.521	6.967.851	7.423.369
10.	Metro	504.393	531.202	562.509	598.905	634.245
11.	Pesawaran	1.491.042	1.575.815	1.667.856	1.773.574	1.887.427
12.	Pringsewu	-	1.262.945	1.346.266	1.439.875	1.538.923
13.	Mesuji	-	1.180.841	1.250.762	1.315.210	1.405.713
14.	Tulang Bawang Barat	-	1.064.633	1.127.645	1.199.365	1.227.649
15.	Pesisir Barat	-	-	-	-	-
<b>Prov. Lampung</b>		<b>34.443.152</b>	<b>36.256.295</b>	<b>38.389.899</b>	<b>40.858.942</b>	<b>43.505.816</b>
<b>Total Kab/Kota</b>		<b>33.313.030</b>	<b>36.215.346</b>	<b>38.304.001</b>	<b>40.586.109</b>	<b>43.142.601</b>

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2013.

Tabel 9 di atas terlihat bahwa PDRB seluruh Kabupaten/Kota Provinsi mengalami peningkatan kecuali Kabupaten Tulang Bawang yang mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar Rp4.357.683.000.000 menjadi RpRp2.129.602.000.000 pada tahun 2009 dikarenakan Kabupaten Tulang Bawang mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Tulang Bawang Barat. Secara keseluruhan total PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan PDRB Provinsi Lampung mengalami peningkatan sejak tahun 2008-2012.

Selain digambarkan dengan PDRB, gambaran perekonomian Provinsi Lampung juga digambarkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 pada tabel berikut :

**Tabel 10. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2008-2012  
(Persen).**

No.	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Lampung Barat	5,09	5,64	5,72	4,54	6,65
2.	Lampung Selatan	5,03	5,28	5,71	6,11	6,30
3.	Lampung Tengah	5,66	5,94	5,88	5,75	6,37
4.	Lampung Utara	5,69	6,32	4,98	5,89	6,03
5.	Lampung Timur	5,21	4,38	5,06	5,57	5,30
6.	Tanggamus	6,36	5,75	5,79	6,41	6,49
7.	Tulang Bawang	6,79	6,98	6,19	5,41	6,93
8..	Way Kanan	4,74	4,89	5,11	5,50	5,67
9.	Bandar Lampung	6,93	6,01	6,33	6,53	6,54
10.	Metro	5,21	5,32	5,89	6,47	5,90
11.	Pesawaran	5,34	5,69	5,84	6,34	6,42
12.	Pringsewu	-	-	6,60	6,95	6,88
13.	Mesuji	-	-	5,92	5,15	6,88
14.	Tulang Bawang Barat	-	-	5,92	6,36	6,53
15.	Pesisir Barat	-	-	-	-	-
<b>Provinsi Lampung</b>		<b>5,35</b>	<b>5,26</b>	<b>5,50</b>	<b>5,75</b>	<b>6,45</b>

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2013.

Pada Tabel 10 di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung mengalami penurunan di tahun tertentu, seperti Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan pada tahun 2011, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2010, Kabupaten Lampung Timur, Kota Bandarlampung, dan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2009, Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2010 dan 2011, serta Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Mesuji pada tahun 2012. Hanya Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Way kanan, dan Kabupaten Pesawaran yang mengalami peningkatan sejak tahun 2008-2012. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung meningkat terkecuali pada tahun 2009 sebesar 5,26%.

### 3. Sejarah Otonomi Daerah di Provinsi Lampung

Krisis moneter atau yang biasa disebut di Indonesia ‘krismon’ adalah permasalahan keuangan yang dialami Indonesia dan beberapa negara di Asia pada tahun 1997. Dampak krisis moneter tersebut menyebabkan melemahnya kurs

rupiah, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem perbankan oleh masyarakat dan investor. Salah satu unsur reformasi total pasca krisis adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota.

Dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat 2, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. UUD 1945 memerintahkan pembentukan UU Otonomi Daerah untuk mengatur mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahap awal pelaksanaannya, otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pada tahap selanjutnya UU otonomi daerah ini kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Di provinsi Lampung berdiri 13 Kabupaten dan dua Kota di mana memiliki beberapa daerah pemekaran sejak tahun 1991 sampai 2013 (Kemendagri RI, 2013).

#### 1. Tahun 1959

Kabupaten Lampung Selatan (UU No. 4 Drt Tahun 1965 Juncto UU No. 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan), Kabupaten Lampung Utara (UU Darurat



No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan), Kabupaten Lampung Tengah (Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan), dan Kota Bandar Lampung (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 - Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 1999).

2. Tahun 1991

Kabupaten Lampung Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara (UU No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat).

3. Tahun 1997

Kabupaten Tanggamus pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tulang Bawang pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus).

4. Tahun 1999

Kabupaten Lampung Timur pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara, dan Kota Metro pemekaran dari Lampung Tengah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II

Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro).

5. Tahun 2007

Kabupaten Pesawaran yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung).

6. Tahun 2008

Kabupaten Pringsewu pemekaran dari Kabupaten Tanggamus (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung), Kabupaten Mesuji pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung), beserta Kabupaten Tulangbawang Barat pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang (UU No. 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung).

7. Tahun 2012

Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung).